

## **BIROKRASI DAN KEDAMAIAN SOSIAL**

### ***Revitalisasi Birokrasi dalam Resolusi Damai Konflik Sosial***

**Suradi**

**Abstract.** Conflict as a social phenomena is never ending in human history. Moreover for the plurality in Indonesian people, conflict is a potential condition as a trigger to social conflict. In Sociologist, the factor of social conflict are caused by treated for the resource access, basic human right among the people, or maybe people and the government. Conflict social among people and government could be happened since the public policy and development program didn't have affirmative action to community welfare. Thus we need government bureaucracy revitalitation to reform the model and development approach to the community welfare, for arising social peaceful life.

**Key word :** social conflict, bureaucracy, social peaceful.

#### **I. PENDAHULUAN**

Persoalan bangsa yang sampai saat ini masih seringkali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia adalah konflik sosial. Fenomena sosial ini terjadi silih berganti, dari satu daerah ke daerah lain. Satu kasus belum juga diselesaikan secara permanen, kasus baru sudah terjadi. Oleh karena itu, konflik sosial ini telah banyak menyita waktu, pikiran dan anggaran negara. Sementara itu pada saat yang sama negara dihadapkan dengan kasus kemiskinan dan busung lapar yang juga perlu perhatian serius karena mengancam kelangsungan hidup banyak jiwa.

Secara sosiologis, terjadinya konflik sosial ini sebagai fenomena yang wajar, karena konflik sebagai proses yang dilalui dalam setiap jaman untuk mencapai perubahan pada taraf kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Paul Wehr (Miall, Oliver and Tom, 2002), bahwa dilihat

dari segi proporsi sentral, konflik merupakan pembawaan sejak lahir pada binatang sosial; konflik ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan cara mereka dibentuk; dan bahwa konflik merupakan proses alami yang umum bagi semua masyarakat.

Meskipun demikian, konflik juga akan menjadi bencana yang membawa dampak kehancuran pada masyarakat yang berkonflik, apabila konflik yang terjadi tidak terkendali dan menggunakan cara-cara kekerasan. Contoh konflik dimaksud seperti yang pernah terjadi di Sambas, Sampit, Ambon, Poso maupun NAD. Sebagaimana dikemukakan seorang pendeta di Singkawang (Suradi, 2005), bahwa akibat konflik sosial dengan cara-cara kekerasan tersebut ratusan jiwa manusia menjadi korban sia-sia, selain kerugian harta benda. Ratusan anak tidak berdosa kehilangan orangtuanya, dan menjalani kehidupan di panti-panti sosial.

Kemajemukan bangsa, selain merupakan sumber daya sosial, pada kenyataannya juga merupakan salah satu kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di Indonesia. Isu yang terkait dengan itu adalah semakin longgarnya rasa kebangsaan dan lunturnya nilai-nilai serta kearifan lokal pada masyarakat. Sebaliknya, semakin menguatnya gagasan yang berkaitan dengan kesukuan dan kedaerahan, misalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pimpinan instansi pemerintah daerah. Kondisi ini sebenarnya merupakan bahaya laten, dan pada saatnya nanti akan terjadi konflik sosial secara terbuka sebagai bentuk perlawanan dari kelompok masyarakat yang merasa tidak memperoleh hak-hak dasarnya.

Berbagai media massa hampir setiap hari melaporkan terjadinya konflik sosial, baik antar kelompok masyarakat (konflik horizontal) maupun masyarakat dengan pemerintah (konflik vertikal). Pada konflik antar kelompok masyarakat, konflik yang terjadi bisa benar-benar murni bersumber dari kelompok masyarakat, tetapi bisa juga terjadi karena ada intervensi dari oknum-oknum birokrasi pemerintah. Permasalahannya, bahwa bentuk konflik ini lebih banyak menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga mengakibatkan kerugian harta milik dan jiwa manusia. Konflik dengan cara kekerasan ini mencerminkan betapa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik dari pihak masyarakat maupun dari unsur birokrasi pemerintah. Menurut perspektif psikologi, bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dicerminkan dengan kecerdasan, budi pekerti atau akhlak mulia dan solidaritas sosial.

Dikemukakan oleh Azar (lihat Miall, Oliver and Tom, 2002), sumber-sumber terjadinya konflik sosial yang berlarut-larut (*Protected Social Conflict* – PSC), karena

adanya perampasan kebutuhan manusia. Kegagalan penguasaan mengatasi masalah ini memperbesar terjadinya konflik sosial yang berlarut-larut. Tidak seperti kepentingan, kebutuhan manusia bersifat antologis dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga konflik muncul yang bersifat kejam, keras dan irrasional. Menurut Azar, kebutuhan keamanan, pengembangan, akses politik, dan identitas (ekspresi budaya dan religius), berhubungan dengan hak dasar, untuk mencari nafkah dan kebebasan. Artinya, apabila kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terjadinya konflik sosial tidak dapat dihindari lagi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, konflik bisa bersumber dari birokrasi berkaitan dengan kebijakan dan program yang belum menyentuh pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Selama masih ada kesenjangan antara pemenuhan dan hak-hak dasar masyarakat dengan kebijakan birokrasi, maka selama itu pula sulit mewujudkan kedamaian sosial.

## II. PERILAKU BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

Birokrasi dapat dipahami sebagai serangkaian jabatan dan tugas yang diorganisasikan secara formal yang dikaitkan dengan perincian yang hirarkhis, serta berada di bawah peraturan yang juga formal. Birokrasi dalam pengertian ini paling banyak dipraktekkan pada pemerintah. Maka tidak dapat terelakkan, birokrasi selalu dikonotasikan dengan pemerintah (Soetrisno, 1995). Pandangan masyarakat, bahwa birokrasi itu adalah (dikonotasikan) pemerintah membawa implikasi pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemerintah. Kesalahan yang terjadi di jajaran birokrasi dilihat oleh masyarakat sebagai kesalahan pemerintah, dan begitu sebaliknya.

Berbagai literatur akhirnya mengakomodasi berbagai pemikiran dan pandangan ini, bahwa birokrasi yang dimaksud yaitu pemerintah atau eksekutif. Dalam tulisan ini pun digunakan istilah birokrasi untuk mendeskripsikan proses-proses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka mendalami konflik sosial di Indonesia yang dikaitkan dengan birokrasi, perlu melihat ke belakang – apa yang pernah dilakukan oleh birokrasi, terutama menyangkut pilihan strategi pembangunan. Pengalaman Indonesia selama lebih 30 tahun merupakan guru yang bijak. Pendekatan pembangunan yang dipilih pemerintah masa Orde Baru, yakni bersifat sentralistis, *top-down* atau dominasi pada birokrasi pemerintah dan sarat dengan pendekatan keamanan (*security approach*); pada kenyataannya membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, khususnya secara sosio-kultural maupun politik. Birokrasi pemerintah masa Orde Baru memilih strategi pertumbuhan pada awal pelaksanaan pembangunan, dan kemudian dikoreksi dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun masih ada prioritas di bidang ekonomi. Pilihan strategi ini pada kenyataannya tidak mampu menciptakan kedamaian yang hakiki dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur. Sebaliknya, sebagian kebijakan pembangunan semakin mengurangi kohesivitas sosial dalam kehidupan masyarakat, antara lain ditandai dengan semakin longgarnya ikatan masyarakat terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal.

Dikemukakan oleh Korten (Moelyarto, 1995), bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui *centrally imposed blueprint plan*, yang dirumuskan oleh teknokrat, dan alokasi sumber pembangunan yang

sentralistis cenderung mengkerdilkan (*to cripple*) potensi masyarakat. Kecenderungan menerapkan pendekatan pembangunan yang demikian, menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dengan birokrat. Karena itu sifatnya menjadi *disempowering*, menekan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Fleksibilitas dan arus komunikasi menjadi terhambat, dan birokrasi menjadi sangat kaku dan lamban. Hal ini sebagai wujud terjadinya bias-bias pemikiran pada administrator pembangunan di Indonesia, yang menurut Bryant dan White (1989) merupakan bukti terjadinya patologi birokrasi. Indikasi terjadinya patologi birokrasi ini, yaitu (1) terpisahnya organisasi pemerintah dengan lembaga lain dari masyarakat dan dari tujuan tradisional; (2) kecenderungan birokrasi untuk menjadi kaku dan rutin. Organisasi hirarkhis cukup kuat menekan para anggota agar berdisiplin, mendefinisikan loyalitas dalam hubungannya dengan ketaatan terhadap peraturan-peraturan; dan (3) semua keputusan dibuat di puncak, dan dengan demikian mengurangi otoritas pada pejabat dalam berbagai tingkatan.

Terjadinya konflik sosial mencerminkan, bahwa negara tidak mampu memuaskan atau mengecewakan keinginan dasar individu dan kelompok identitas. Sebagaimana dikemukakan Azar (Miall, Oliver and Tom, 2002), kebanyakan negara yang mengalami konflik sosial yang berlarut-larut cenderung dicirikan oleh pemerintahan yang tidak mampu, picik, rapuh dan otoriter yang gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, menurut Drucker (Ginanjar, 1996) dalam bukunya "*Management : Task, Responsibilitas, Practices*", apa yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, hendaknya jangan dilakukan oleh

pemerintah. Pemikiran Drucker ini diperkuat oleh Giddens (1999), di mana ia tidak percaya bahwa perubahan ke arah masyarakat yang lebih adil dapat dicapai dengan meningkatkan peran negara. Giddens menunjukkan bukti empiris yang jelas tentang gagalnya rezim komunis di Uni Soviet, Eropa Timur, dan Republik Rakyat Cina. Kemudian dalam pembahasan “*Negara dan Civil Society*”, Giddens menegaskan kembali, bahwa isunya bukan peranan pemerintah yang lebih besar atau lebih kecil, tetapi adanya pengakuan bahwa pemerintah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global, dan bahwa otoritas, termasuk legitimasi negara harus diperbaharui secara aktif. Menurut Bowman dan Hamton (Supriyatna, 1997), munculnya tuntutan debirokratisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, devolusi dan privatisasi dikarenakan ketidakpedulian pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan pembangunan sampai ke daerah. Pemikiran Bowman dan Hamton ini diperkuat oleh Bintoro (1992), bahwa adanya tuntutan tersebut karena aktivitas pembangunan tidak mengembangkan keswadayaan dan keswakyayaan masyarakat.

Berbagai pemikiran tersebut dapat menjadi alat untuk melihat bagaimana birokrasi di Indonesia memilih model dan strategi pembangunan, dikaitkan dengan terjadinya konflik sosial. Selain itu juga dapat menjadi inspirasi bagi birokrasi untuk mengembangkan model dan strategi pembangunan yang menjamin kedamaian sosial bagi seluruh rakyat. Visi pembangunan kesejahteraan sosial – yang di dalamnya termasuk kedamaian sosial, bahwa kesejahteraan sosial menjadi hak semua orang dalam semangat “*social welfare for all*”. Meskipun negara tidak menganut model *welfare state* murni, namun menjadi kewajiban negara untuk

mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

### III. KONFLIK BIROKRASI DENGAN MASYARAKAT

Konflik sosial yang akhir-akhir ini seringkali terjadi, adalah konflik antara birokrasi dengan masyarakat. Contohnya, konflik sosial antara birokrasi dengan masyarakat di DKI Jakarta pada kasus pembebasan lahan untuk jalan tol dalam kota, relokasi korban kebakaran rumah penghuni di bawah jalan tol, rehabilitasi sungai Ciliwung di Jakarta, dan pengusuran terhadap penghuni liar di lahan pemerintah. Selain itu, hampir di semua daerah konflik sosial pada penertiban pedagang kaki lima (PKL), dan konflik antara birokrasi dengan komunitas adat terkait dengan hak-hak ulayat.

Apabila fenomena konflik sosial tersebut dilihat dari perspektif teoritis, situasi ini menggambarkan pemilihan kebijakan birokrasi yang tidak tepat. Atau sekurang-kurangnya ada intervensi oleh oknum dalam suatu birokrasi yang mempengaruhi pilihan kebijakan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak tepat. Hal ini menegaskan, bahwa birokrasi mengalami patologi dan terjadinya bias-bias pemikiran pada para administrator. Kondisi yang dapat diamati adalah pendekatan keamanan dan ketertiban lebih dominan (*security approach*), dibandingkan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), seperti yang pernah diterapkan pada era Orde Baru. Pendekatan ini tentu saja tidak efektif, karena pada prakteknya menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks, seperti: hilangnya tempat tinggal, hilangnya sumber nafkah, tidak diperoleh pelayanan sosial dan hak-hak dasar untuk kelangsungan hidup masyarakat (korban).

Di sisi lain, warga yang mendiami lahan terlarang atau membangun rumah liar, diwajibkan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), membayar bea pemasangan dan pemakaian listrik resmi (PLN) dan air (PDAM) serta bagi PKL membayar retribusi. Mereka yang memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut telah bertahun-tahun membangun jejaring kerja secara luas, baik di bidang ekonomi maupun sosial; dan bahkan sudah tiga generasi menempati lahan tersebut. Setelah bertahun-tahun kewajiban dipenuhi, atas nama pembangunan mereka harus meninggalkan lahan usaha maupun tempat tinggalnya, dan menjalani hidup dalam ketidakpastian. Maka dari itu, konflik sosial antara birokrasi dengan masyarakat tidak dapat dihindari, disebabkan adanya ancaman terhadap sumber nafkah, kelangsungan hidup dan hak-hak dasar pada masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Azar terdahulu, bahwa konflik sosial antara birokrasi dengan masyarakat merupakan situasi yang tidak dapat dicegah, meskipun sebenarnya tidak dikehendaki.

Konflik antara birokrasi dengan masyarakat akhirnya menjadi fakta sosial yang ada dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Selama birokrasi masih mengedepankan pendekatan keamanan dan ketertiban, maka selama itu pula konflik sosial antara birokrasi dengan masyarakat akan terus terjadi, dan tidak akan pernah berakhir. Dampaknya cukup luas, yaitu kerugian pada masyarakat, dan kerugian yang harus dibayar oleh pemerintah, baik karena kerusakan sarana prasarana maupun perginya investor ke luar negeri karena merasa tidak aman. Situasi ini menggambarkan, bahwa konflik sosial yang terjadi di tanah air, dampaknya tidak hanya dirasakan secara lokal tetapi berdampak luas secara nasional. Dilihat dari

kurun waktunya, dampak konflik sosial tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga akan dirasakan dalam jangka panjang dan bersifat laten. Hal ini yang perlu dipahami oleh birokrasi, dan menjadi pertimbangan ketika sebuah kebijakan diimplementasikan di masyarakat.

#### **IV. REVITALISASI BIROKRASI UNTUK KEDAMAIAN SOSIAL**

Istilah revitalisasi, menurut Kamus Bahasa Indonesia (Wojowasito, 1987), berarti menghidupkan kembali atau menguatkan kembali. Atas dasar pengertian ini, maka pengertian revitalisasi dalam konteks birokrasi, dipahami dalam pengertian reposisi dan reorientasi fungsi dan peranan birokrasi dalam pembangunan. Dalam pengertian ini, bagaimana seharusnya birokrasi mendistribusikan kekuasaan dan sumber-sumber yang dimiliki, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dengan demikian dominasi birokrasi pemerintah dalam kebijakan maupun program, akan menjadi berkurang secara proporsional. Birokrasi menyerahkan sebagian kekuasaan dan sumber-sumber yang dimiliki kepada masyarakat, kemudian mengambil posisi dan peranan sebagai fasilitator dan regulator. Dalam kerangka ini birokrasi tetap diperlukan untuk menetapkan standar dan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Wilson (Ginanjar, 1996) dalam bukunya "*Bureaucracy : What Government Agencies Do and Why They Do it*", bahwa birokrasi tetap diperlukan, tetapi harus tidak birokratis.

Konflik sosial merupakan fenomena yang multidimensi. Banyak kondisi yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial ini, yaitu: faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, agama dan lingkungan. Faktor-

faktor tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi satu sama lain saling berkaitan. Pada beberapa kasus seringkali sulit diketahui akar utama penyebab konflik sosial, karena faktor-faktor tersebut telah membangun jejaring yang kompleks. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sosial tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua instansi pemerintah. Tetapi berbagai instansi perlu secara bersama-sama melakukan tindakan nyata menangani konflik sosial tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, Departemen Sosial memiliki program bantuan sosial bagi korban bencana sosial (termasuk di dalamnya korban konflik sosial), program kajian ketahanan sosial masyarakat dan program penyuluhan sosial bagi masyarakat di daerah rawan konflik sosial. Meskipun ketiga program ini memiliki tujuan khusus yang berbeda, namun tujuan umumnya adalah sama, yaitu terwujudnya kedamaian sosial. Program ini tentu akan lebih efektif apabila disinergikan. Membangun sinergi ini mudah dalam tataran teori, akan tetapi sangat sulit dalam tataran praktis. Sinergitas program pembangunan akan dapat terwujud, apabila birokrasi memiliki komitmen dan amanah untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Pemahaman terhadap hakikat dan karakteristik konflik sosial sangat penting, dalam upaya menemukan akar masalah dan anatomi konflik sosial tersebut. Pemahaman ini akan menjadi dasar untuk menetapkan sumber daya yang tersedia, dan sumber daya yang diperlukan guna menangani konflik sosial. Pemahaman ini juga menjadi dasar bagi birokrasi untuk melakukan revitalisasi secara luas terhadap fungsi dan peranannya dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam rangka mewujudkan kedamaian sosial.

Berdasarkan pemikiran di atas, revitalisasi birokrasi dalam upaya mewujudkan kedamaian sosial dimulai dari:

*Pertama*, pemilihan model dan pendekatan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan hajat hidup masyarakat. Model *bottom-up* dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), merupakan model dan pendekatan yang tepat dalam mewujudkan kedamaian sosial, karena model dan pendekatan ini bertumpu pada kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Model ini akan mampu membangun kohesivitas sosial yang kuat antar kelompok masyarakat, maupun masyarakat dengan birokrasi, dan mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat di berbagai bidang pembangunan.

Pemilihan model dan pendekatan pembangunan ini hendaknya sudah menjadi komitmen nasional, dan telah melembaga pada semua instansi sektoral di pusat maupun di daerah. Di dalam model dan pendekatan tersebut secara tegas ditetapkan standar operasional yang harus diikuti oleh para administrator pembangunan.

*Kedua*, visi "*welfare for all*" menyangkut hak dasar masyarakat, dan birokrasi hendaknya mampu menterjemahkan visi itu ke dalam kebijakan publik yang responsif terhadap hajat hidup masyarakat. Misalnya, kebijakan publik yang berkaitan dengan kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM, kesehatan (obatan-obatan), pendidikan, kenaikan harga kebutuhan pokok (terutama beras dan minyak goreng), dan penggusuran tempat usaha (PKL) maupun penguasaan tanah adat.

*Ketiga*, program-program kesejahteraan sosial perlu ditelaah kembali, terutama yang berkaitan dengan konsep dan implementasinya. Isu yang seringkali mengemuka terkait dengan program-program sosial, seperti : bantuan sosial tidak sesuai kebutuhan nyata klien, prosedur bantuan birokratis, pendistribusian bantuan tidak tepat sasaran, pelayanan sosial bersifat pukol rata dan terjadi ketidakadilan.

Terkait dengan ketiga hal di atas, maka perlu ada perubahan perilaku birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, sehingga tujuan fungsional program dapat tercapai secara optimal. Kajian-kajian terhadap kebutuhan nyata (*real need*) masyarakat perlu dilakukan dengan benar, karena data dan informasi yang dihasilkan melalui kajian itu berkaitan dengan jenis bimbingan, pelayanan dan bantuan sosial yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan dengan serius oleh pihak independen, guna memperoleh data dan informasi yang obyektif terkait dengan kinerja program yang dilaksanakan.

Pemikiran revitalisasi birokrasi tersebut akan menjadi dokumen di atas kertas, dan akan tetap menjadi sebuah wacana politik pembangunan sosial, apabila tidak ada kemauan politik di lingkungan birokrasi untuk berubah. Jika demikian, maka bangsa ini tidak akan bisa berharap banyak terjadinya kedamaian sosial di negeri ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryant, Louise and G. White, 1989, *Manajemen Pembangunan di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES.
- Gidden, Anthony, 1999, *The Third Way/Jalan Ketiga: Pembaruan Demokraasi Sosial* (Ketut Arya Mahardika: penterjemah), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dengan Pemerataan*, Jakarta: CIDES.
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham and Tom Woodhouse, 2002, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras* (Tri Budhi Satrio: penterjemah), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1995, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius Press.
- Supriyatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung: HUP-Press.
- Suradi, 2003, "Pemberdayaan Birokrasi dan Masyarakat : Revitalisasi Fungsi Dan Tugas Birokrasi Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat", *INFORMASI*, Volume 8 Nomor 4 Tahun 2003, Jakarta: Puslitbang Kesejahteraan Sosial.

—————, 2005, “Pelayanan dan Perlindungan Anak di Kalimantan Barat” (tidak diterbitkan).

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1992, “Perspektif Pembangunan Menjelang Tahun 2000” dan Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya AR, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan: Perkembangan teori dan Penerapan*, LP3ES : Jakarta.

Wojowasito, 1987, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

---

**Drs. Suradi, M.Si.** Magister Sosiologi kekhususan Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Indonesia. Peneliti Madya bidang kepakaran Kebijakan Sosial. Ketua dewan redaksi *INFORMASI*, anggota penilai peneliti instansi, ketua tim penelitian, anggota tim teknis pemberdayaan sosial KAT; aktif menulis di berbagai jurnal dan majalah ilmiah bidang kesejahteraan sosial.